Operasional Bandara Al Jufri Palu Berangsur Normal

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan delapan hari pascagempa dan tsunami di Palu-Donggala, kondisi Bandara Mutiara Al Sis Jufri berangsur membaik. Begitu pula dengan kondisi kelistrikan di bandara tersebut.

"Kementerian Perhubungan bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan pengamatan awal. Alhamdulillah, kerusakan ini hanya terjadi pada beberapa bagian tertentu dan ini bukan kerusakan struktur yang berat," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Baitul Ihwan di Jakarta, Jumat (5/10).

Baitul menjelaskan, saat ini Bandara Mutiara Al Sis Jufri telah dibersihkan dan dirapikan. Pengecekkan struktur pada beberapa bagian juga sudah dilakukan, sehingga penerbangan komersial sudah berangsur membaik. Pada beberapa bagian yang rusak seperti di lantai 1 juga sudah dilakukan perbaikan sementara, sehingga bisa dioperasikan dengan baik.

Lebih lanjut, Baitul menerangkan, penggunaan listrik di bandara juga sudah berangsur normal, meskipun pada beberapa waktu tertentu masih mengalami gangguan. Perusahaan Listrik Negara (PLN) pun telah berhasil mengoperasikan beberapa gardu listrik di bandara. "Saat ini bandara masih menggunakan genset dengan dukungan pasokan solar yang cukup sehingga kondisi listrik saat ini sudah berangsur normal," terangnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, berdasarkan hasil *assesment* Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie yang dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tidak ada kerusakan signifikan yang terjadi. Kerusakan hanya terjadi pada hal-hal minor seperti, plafon dan kolom yang perlu diperbaiki.

"Akan kami upayakan dalam satu minggu sudah *recovery*. Saya sudah menugaskan perbaikan keduanya kepada kontraktor," imbuhnya.

Sambil menunggu perbaikan *runway* dilakukan, para tamu dari luar negeri yang berencana berkunjung ke Palu dalam beberapa hari ini akan ditampung di Balikpapan terlebih dahulu. "Dalam beberapa hari ini akan ada tamu dari beberapa negara sahabat. Sementara ini oleh panglima, akan ditampung di Balikpapan dan itu akan secara bertahap bergerak ke Palu. Tapi nanti pada 12 Oktober atau 13 itu bisa langsung," ungkap Menhub Budi.

Sebagai informasi, data terakhir pada Kamis (4/10) menunjukkan bahwa terdapat lima penerbangan komersial dari dan ke Bandara Mutiara Sis Al Jufri, yang mengangkut 1.096 penumpang dan mengangkut kargo bantuan 14 ton.

Sementara itu, tiga kapal bantuan kembali diberangkatkan. Kemenhub telah mengirim bantuan barang sebanyak 20 koli yang terdiri dari sembako, logistik, dan obat-obatan untuk korban gempa Palu dan Donggala melalui Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kapal Camara Nusantara 3 yang telah berangkat Kamis (4/10) pukul 16.00 WIB menuju Pelabuhan Pantoloan dengan estimasi perjalanan empat hari.

"Pengiriman barang ini nanti akan diterima oleh Posko Perhubungan Laut di Pelabuhan Pantoloan. Ada pula kapal KMP Julung Julung yang membawa bantuan logistik dari Toli Toli menuju Pelabuhan Taipa. Sedangkan pada Jumat (5/10), KM Bukit Siguntang mengangkut 640 penumpang pada 24.00 Wita dan rencana sampai di Balikpapan pukul 15.00 Wita," jelas Baitul. **(esa)**

Konstruksi Tol Pandaan-Malang Rampung Desember 2018

JAKARTA – PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) menargetkan pekerjaan konstruksi Jalan Tol Pandaan-Malang seksi I-III Pandaan-Singosari sepanjang 30,62 kilometer (km) akan rampung pada Desember 2018, sehingga bisa mulai dioperasikan pada Januari 2019. Hingga saat ini progres pembebasan lahan sudah mencapai lebih dari 90% dari total kebutuhan.

"Saya yakini dalam waktu tidak lama, jalan tol ini akan beroperasi, sebab seksi I sampai III ditargetkan tahap konstruksi selesai awal Desember tahun ini, dan dapat beroperasi pada Januari 2019," ungkap Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang Agus Purnomo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (5/10).

Jalan Tol Pandaan-Malang dengan totap panjang 38,488 km ini dibangun dengan lima seksi. Seksi I Pandaan-Purwodadi sepanjang 15,47 km, seksi II Purwodadi-Lawang sepanjang 8,05 km, seksi III Lawang-Singosari sepanjang 7,10 km, seksi IV Singosari-Pakis sepanjang 4,75 km, dan seksi V Pakis-Malang sepanjang 3,11 km.

Sampai akhir September 2018, lanjut dia, pengerjaan konstruksi Jalan Tol Pandaan-Malang untuk seksi I mencapai 87,157%, seksi II mencapai 63,118%, seksi III sekitar 75,188%, seksi IV sebesar 47,532%, dan seksi V sekitar 23,112%.

Agus mengatakan, setelah beroperasi Jalan Tol Pandaan-Malang akan membawa dampak ekonomi bagi pengguna jalan tol serta lingkungan sekitar. Salah satu contohnya pendapatan pelaku UKM dan kuliner di sekitar daerah wisata akan meningkat termasuk pelaku usaha penginapan.

"Kalau sekarang dari Surabaya ingin ke Batu untuk liburan bisa memakan waktu lima sampai enam jam di saat liburan. Nanti, setelah lewat tol mungkin tidak sampai satu jam dengan kecepatan rata-rata 100 km/jam," katanya.

Pada bagian lain, pembebasan lahan untuk proyek jalur tol Semarang-Batang di Jawa Tengah diperkirakan bertambah 385 bidang seiring dengan rencana pembuatan pintu keluar tol di daerah Ngaliyan, Semarang. Lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan pintu keluar tol tersebut terletak di lima kelurahan, yakni Kelurahan Kembangarum, Purwoyoso, Ngaliyan, Tambakaji, dan Gondoriyo.

Menurut Koordinator Humas PT Waskita Karya untuk seksi V Tol Semarang-Batang Sutarji, saat ini Tim Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tengah mengejar pembebasan lahan tambahan untuk pembuatan pintu keluar tol Semarang-Batang di kawasan Ngaliyan, Semarang. "Untuk penlok (penetapan lokasi) sudah tahapan identifikasi. Total ada tambahan sebanyak 385 bidang lahan yang harus dibebaskan untuk *exit* tol," katanya, seperti dilansir *Antara*.

Proses pembebasan lahan tol tersebut, ujarnya, sudah disosialisasikan kepada warga yang terdampak sejak Mei 2018. Namun tahapannya baru sebatas identifikasi kebutuhan lahan. Sedangkan permasalahan ganti rugi lahan masih dalam proses penghitungan yang direncanakan secara bertahap di masing-masing kelurahan, dan nilainya tentu saja berbeda dari pembebasan lahan sebelumnya.

Diakuinya, banyak warga yang meminta lahannya segera dibayar karena nilai ganti rugi ini terbilang tinggi sebagaimanan informasi yang diterima dari warga yang telah menerima ganti rugi lahan. Sementara itu, Manajer Pengendalian Lahan PT Jasa Marga Semarang-Batang (JSB) Hadi Susanto mengatakan, peresmian jalur tol Semarang-Batang tetap ditargetkan pada akhir 2018 meski ada tambahan pembebasan lahan. Dengan bertambahnya lahan yang harus dibebaskan, kata dia, jumlah lahan yang masih belum beres bertambah dari total tanah yang sudah dibebaskan sekitar 86% sampai saat ini.

"Untuk pembangunan fisik jalur tol Semarang-Batang sepanjang 75 kilometer sudah mencapai 88 persen. Kami optimistis jalan tol secara keseluruhan bisa diresmikan akhir tahun ini," kata Hadi. **(ean)**

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/wsj/18

Rencana Pembangunan Tol BORR Sesi 3a

Sejumlah pengendara kendaraan bermotor melintas di bawah jalan tol layang Bogor Outer Ring Road (BORR) Sholeh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/10). Pembangunan jalan tol layang lanjutan sesi 3A mulai ruas Simpang Yasmin hingga Simpang Semplak, Bogor dengan panjang jalan sekitar 2,85 km dan anggaran sebesar Rp3 triliun yang bersumber dari APBN tersebut akan dilakukan mulai 15 Oktober mendatang.

PPA Targetkan Merpati Airlines Beroperasi Kembali pada 2020

Oleh **Thresa Sandra Desfika**

▶ JAKARTA – PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) menargetkan Merpati Nusantara Airlines (MNA) mulai beroperasi kembali pada 2020. Saat ini, Merpati dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan berakhir damai, sehingga pada tahun depan bisa memulai tahapan perizinan operasi dan pengadaan pesawat.

Sekretaris Perusahaan PT PPA Edi Winarto menjelaskan, sidang PKPU Merpati semula akan digelar pada Rabu (3/10) lalu. Tetapi, karena ada beberapa hal yang belum disepakati oleh para kreditur atas proposal perdamaian yang diajukan Merpati, maka sidang ditunda dan bakal digelar pada 17 Oktober 2018.

"Sebelum tanggal 17 Oktober itu akan ada rapat kreditur. Rapat kreditur nanti disahkan oleh pengadilan niaga pada tanggal 17 Oktober. Kalau kreditur nanti menyepakati rencana perdamaiannya, maka program restrukturisasi juga bisa berjalan. Tapi kalau rapat kreditur belum menyetujui bisa diperpanjang lagi, tapi kalau tidak menyetujui ya bisa pailit," kata Edi saat dihubungi, Jumat (5/10).

Karena itu, Edi menuturkan, kepastian beroperasinya kembali Merpati atau tidak, ditentukan dalam rapat para kreditur serta disahkan oleh pengadilan. Apabila disetujui untuk beroperasi kembali, Merpati masih harus melalui proses perizinan operasi sampai dengan pengadaan pesawat.

"Jadi masih ada lagi proses perizinan dan proses pembelian pesawat setelah itu baru bisa beroperasi. Kami harapkan pada tahun 2020, Merpati sudah bisa jalan lagi karena waktu setahun, yaitu tahun 2019, untuk proses perizinan dan proses-proses persiapan," ungkap Edi.

Dia menambahkan, sudah ada calon investor yang siap menanamkan modal di Merpati senilai Rp 6,4 triliun. Namun, kepastian kerja sama antara calon investor itu dan Merpati akan ditentukan melalui rapat para kreditur, kemudian disahkan oleh pengadilan. Jika disetujui, calon investor akan membagi dananya itu untuk modal kerja Merpati dan pengadaan pesawat.

Dikatakan bahwa calon investor yang dimaksud adalah PT Intra Asia Corpora. Pada 29 Agustus 2018, telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian transaksi penyertaan modal bersyarat antara MNA dan Intra Asia Corpora. Perjanjian itu secara garis besar berisi komitmen Intra Corpora untuk menyetorkan modal senilai Rp 6,4 triliun dalam dua tahun setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Para pihak yang meneken perjanjian adalah Direktur PT MNA Asep Ekanugraha dan Direktur PT Intra Asia Corpora Kim Johanes Mulia, serta disaksikan oleh Direktur Utama PT PPA Henry Sihotang.

Adapun kondisi Merpati saat ini di antaranya seluruh pesawat sudah tidak beroperasi, mayoritas *unserviceable* dan berusia tua, berhenti beroperasi sejak Februari 2014, *Air Operator Certificate* (AOC) dan surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal (SIUAU/NB) telah dicabut sejak 2015; PT MNA telah melakukan *spin-off* pada tahun 2016 dari Divisi Maintenance dan Training menjadi PT Merpati Maintenance Facility dan PT Merpati Training Center. Kondisi Keuangan Merpati, yakni aset Rp 1,21 triliun, kewajiban Rp 10,72 triliun, dan ekuitas Rp 9,51 triliun.

Pada 15 Januari 2018, terdapat salah satu kreditur PT MNA, yaitu PT Parewa Aero Katering mengajukan permohonan PKPU kepada PT MNA pada Pengadilan Niaga Surabaya, yang kemudian PT MNA diputus dalam PKPU pada tanggal 6 Februari 2018.

Sedangkan, peran PT PPA dalam proses PKPU Merpati adalah mendampingi PT MNA dalam proses PKPU berdasarkan rencana bisnis dan hasil negosiasi yang dilakukan antara PT MNA dan calon mitra, PT PPA membantu merancang proposal perdamaian PT MNA yang akan diajukan kepada para kreditur; PT PPA akan membantu penyusunan perjanjian transaksi atas kesepakatan yang telah diperoleh antara calon mitra dan PT MNA.

Dihubungi terpisah, Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Maria Kristi menyatakan, pihaknya belum menerima pengajuan AOC dari Merpati hingga sekarang.

INSA Minta Asas *Cabotage* Harus Dipertahankan

JAKARTA – Indonesia National Shipowners Association (INSA) meminta pemerintah tetap membatasi investasi asing pada sektor usaha angkutan multimoda, termasuk di dalamnya angkutan laut. Apabila keran investasi usaha angkutan multimoda dibuka 100% bagi asing, itu akan menodai kebijakan asas *cabotage* angkutan laut nasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjelaskan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut, merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas *cabotage*.

"Asas *cabotage* harus tetap berjalan konsisten karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak," kata Carmelita dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat (5/10).

Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor empat terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan keselamatan dan keamanan nasional di atas segalanya termasuk investasi asing.

Di sisi lain, terang Carmelita, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100% untuk investasi asing, maka akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan.

Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, asas *cabotage* menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih dan diawaki oleh warga negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas *cabotage*, seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, Tiongkok, Australia, dan Filipina.

Terlebih, kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas *cabotage*.

"Jadi asas *cabotage* harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo. Kebijakan asas *cabotage* merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatori atau bersifat wajib untuk negara. Asas *cabotage* harus dipertahankan demi kepentingan nasional," ungkapnya.

Menurut dia, kebijakan asas *cabotage* yang tertuang dalam Instruksi Presiden No 5 tahun 2005 dan Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas *cabotage* yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angkutan laut.

Pada 2017, terang Budhi, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas *cabotage* pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan.

Dengan kekuatan armada yang cukup besar, tambah Budhi, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Asas *cabotage* juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. **(esa)**

WAPO

PT. WAHANA PRONATURAL Tbk.

Office: Gedung Bumi Mandiri Tower II Lt.9 R.907. Jl. Panglima Sudirman No. 66 - 68 Surabaya. Telp.: (031) 5352705 Fax.: (031) 5352704

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2018 DAN 2017
(Jumlah dalam Jutaan Rupiah kecuali Nilai Nominal Saham)

ASET	2018	2017
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	520	222
Piutang usaha - pihak ketiga	14.205	18.758
Piutang lain-lain	2.961	973
Persediaan	24.423	39.915
Pajak dibayar dimuka	178	387
Uang muka - pihak ketiga	6.939	7.326
Biaya dibayar dimuka	10	9
Jumlah Aset Lancar	**49.236**	**67.590**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap-setelah dikurangi	54.338	55.795
Aset pajak tangguhan	337	399
Aset lain-lain	36	36
Jumlah Aset Tidak Lancar	**54.711**	**56.230**
JUMLAH ASET	**103.947**	**123.820**

LIABILITAS DAN EKUITAS	2018	2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Usaha - pihak ketiga	12.632	17.387
Uang muka penjualan	11.923	28.322
Beban akrual	-	310
Utang Pajak	328	480
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**24.883**	**46.499**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas imbalan kerja	1.346	1.596
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**1.346**	**1.596**
EKUITAS		
Modal saham - Nilai nominal Rp. 100,- per saham		
Modal dasar - 2.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor - 520.000.000 saham	52.000	52.000
Tambahan modal disetor	12.554	12.554
Komponen ekuitas utang konversi saham	69.513	69.513
Penghasilan komprehensif lain		
- Pengukuran kembali program imbalan paska kerja	278	(214)
- Pajak yang terkait	(69)	53
Defisit	(56.558)	(58.181)
Jumlah Ekuitas	**77.718**	**75.725**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**103.947**	**123.820**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(Dalam Jutaan Rupiah Kecuali Laba Per Saham)

	2018	2017
PENJUALAN	176.493	71.284
BEBAN POKOK PENJUALAN	(171.771)	(68.054)
LABA KOTOR	**4.722**	**3.230**
- Beban Penjualan	(59)	(421)
- Beban Umum dan administrasi	(3.018)	(2.922)
LABA USAHA	**1.645**	**(113)**
- Pendapatan/ Beban keuangan - Bersih	535	-
- Lain-Lain Bersih	(15)	4
LABA SEBELUM PAJAK	**2.165**	**(109)**
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
- Pajak kini	(603)	(157)
- Pajak tangguhan	61	41
Jumlah beban pajak tangguhan	**(542)**	**(116)**
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	**1.623**	**(225)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
- Pengukuran kembali atas imbalan pasca kerja	492	(79)
- Manfaat (Beban) Pajak terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi	(123)	20
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	**1.992**	**(284)**
LABA (RUGI) PER LEMBAR SAHAM	**3,83**	**(0,55)**

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(Jumlah dalam Jutaan Rupiah kecuali Laba Per Saham)

	2018	2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :		
- Penerimaan kas dari pelanggan	162.657	83.121
- Pembayaran kepada pemasok	(161.034)	(68.168)
- Pembayaran beban usaha	(1.791)	(11.498)
- Pembayaran pajak penghasilan	(423)	(1.310)
- Penerimaan bunga dan keuangan	534	4
- Penerimaan lainnya	355	-
Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**298**	**2.149**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
- Perolehan aset lain-lain	-	-
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**-**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
- Pembayaran untuk pinjaman bank	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**298**	**2.149**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	221	1.270
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**520**	**3.419**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN 2017
(Dalam Jutaan Rupiah Kecuali Laba Per Saham)

	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Komponen Ekuitas pada Utang konversi saham	Penghasilan Komprehensif lain: Pengukuran kembali program imbalan paska kerja	Penghasilan Komprehensif lain: Pajak yang terkait	Saldo laba / (defisit)	Jumlah
Saldo 1 Januari 2017	**52.000**	**12.554**	**69.513**	**(57)**	**14**	**(58.958)**	**75.066**
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)	-	-	-	(158)	39	-	(118)
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	777	777
Saldo 31 Desember 2017	**52.000**	**12.554**	**69.513**	**(215)**	**53**	**(58.181)**	**75.725**
Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 24 (Revisi 2013)	-	-	-	493	(122)	-	370
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	-	1.623	1.623
Saldo 30 Juni 2018	**52.000**	**12.554**	**69.513**	**278**	**(69)**	**(56.558)**	**77.718**

Catatan :
- Laporan Posisi Keuangan telah disusun berdasarkan laporan keuangan pada tanggal dan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Ekuitas dan Laporan Arus Kas telah disusun berdasarkan laporan keuangan pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017.
- Kurs Tengah BI per 30 Juni 2018 Rp 14,404,- , kurs per 31 Desember 2017 Rp. 13.548,-

Surabaya, 6 Oktober 2018
PT Wahana Pronatural,Tbk.
SE & O

Direksi